

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam suatu Negara ada beberapa instrument penting penunjang terawatnya iklim ber-Demokrasi. Diantara Instrumen tersebut salah satunya adalah pelaksanaan Pemilu. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Gaffar, “Pemilu adalah media transfer kekuasaan bagi suatu komunitas politik, dan dengan adanya pemilu membantu terciptanya pelembagaan konflik”(Gaffar 2000 : 28). Transfer atau pergantian kekuasaan inilah yang kemudian membuat iklim berdemokrasi senantiasa terjaga, melalui pergantian kekuasaan tidak ada penguasa yang bertahta secara abadi atau tirani. Sejatinya dengan transfer kekuasaan melalui pemilu meniscayakan tidak terjadinya dinasti politik dalam suatu negara. Poin kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pelembagaan konflik, instabilitas iklim politik pra pemilu bisa dinetralisir melalui momentum Pemilu, karena pihak yang tadinya berkonflik akan berkonsentrasi pada pelaksanaan Pemilu ketimbang melanjutkan konflik.

Salah satu tujuan reformasi adalah untuk mewujudkan suatu Indonesia baru, yaitu Indonesia yang lebih demokratis. Hal ini bisa dicapai dengan mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Dalam mekanisme sistem

pemerintahan berasaskan demokrasi yang lekat dengan makna kebebasan maka tatanan atau struktur pemerintahan yang kita pakai di Indonesia ini dipilih dengan cara pemilihan umum (pemilu) yang hakikatnya dilakukan secara jujur, adil, bebas, rahasia dan terbuka untuk seluruh warga negara Indonesia yang di atur dalam UUD tanpa pembedaan ras, agama, suku, ataupun gender.

Pemilu di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Setelah amandemen keempat UUD 1945 pada tahun 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pemilihan presiden dan wakil presiden pun dimasukkan ke dalam rezim pemilu. Pemilihan presiden dan wakil presiden sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada Pemilu tahun 2004. Dan pada tahun 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada) juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu.

Sejak tahun 2005, bangsa Indonesia telah memasuki babak baru dalam pemilu yakni dengan diberlakukannya sistem yang berbeda pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh masyarakat Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa adanya kebebasan bagi masyarakat agar dapat menentukan pilihan untuk kepala daerah serta wakil kepala daerahnya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dalam UU No. 32

tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat dengan asas langsung, umum, jujur, rahasia dan adil”. Berdasarkan kutipan UU No. 32 tahun 2004 itu jelas dinyatakan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan pemilihan secara langsung oleh masyarakat Indonesia melalui pemilihan umum yang telah diatur dalam UU tanpa ada paksaan dari pihak manapun termasuk dari calon atau kandidat yang mengikuti pemilukada.

Selanjutnya dalam UU No. 32 tahun 2004 Bab 1 pasal 1 ayat 20 disebutkan bahwa “Pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah bakal pasangan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan untuk dipilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”. Maka dapat dikatakan pemilihan kepala daerah secara langsung sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, merupakan suatu kemajuan dan pembaruan, pemilihan kepala daerah secara langsung akan menjadi babak penting dalam sejarah perpolitikan di Indonesia, dimana rakyat terlibat secara langsung dalam pemilihan pemimpinnya.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada) merupakan suatu perwujudan mekanisme demokratisasi di negara kita mencapai kedaerah-daerah dengan diselenggarakannya pemilihan kepala daerah secara langsung. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada) secara langsung adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah propinsi dan

kabupaten atau kota. Rakyat memiliki hak untuk menentukan dan memilih secara langsung kepala daerah dan wakil kepala daerahnya masing-masing, artinya pada wilayah kabupaten, masyarakat dapat memilih calon bupati dan wakil bupati, pada wilayah kota, masyarakat dapat memilih calon walikota dan wakil walikota, dan dalam wilayah propinsi, masyarakat dapat memilih gubernur dan wakil gubernur. Pemilihan secara langsung tersebut tidak lepas dari kebijakan otonomi daerah yang diberikan oleh pusat kepada daerah.

Sama seperti pemilihan lainnya Pilkada dilaksanakan dalam tenggang waktu lima tahun sekali, tetapi masing-masing daerah memiliki waktu dan tahun yang berbeda-beda dan hal inilah yang akan diperbaiki oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat melalui DPR komisi II selaku bidang kepemiluan mengeluarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai pengganti Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada dan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).

Setelah dilakukannya Pemilukada Kota Yogyakarta pada tahun 2017, berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara pada pilkada tahun 2017 yang telah dilakukan disetiap kecamatan, hasil perolehan suara pada Pilkada Kabupaten Jepara tersebut pada akhirnya dimenangkan oleh pasangan nomor urut 2 yaitu pasangan Hariyadi Suyuti-Heroe Poerwadi sebagai Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Berikut ini tabel hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilukada Kota Yogyakarta tahun 2017.

**Tabel 1.1**  
**Perolehan Suara Pemilukada Kota Yogyakarta Pada Tahun 2017**

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara	Presentase	Partai Pendukung
1	Hariyadi Suyuti-Heroe Poerwadi	100.332	50,30%.	Golkar, PAN, PKS, Demokrat, dan Gerindra
2	Imam Priyono-Ahmad Fadli	99.143	49,70%	PDIP, PKB, NASdem

Sumber : (KPU Kota Yogyakarta Tahun 2017)

Menurut tabel diatas Pasangan Hariyadi Suyuti dan Heroe Purwadi menang dengan meraih 100.332 atau 50,30 persen suara, sedangkan Imam Priyono-Ahmad Fadli meraih 99.143 atau 49,70 % suara dari 794 TPS di Yogyakarta. Hariyadi-Heru menang di 7 TPS dengan kemenangan terbesar pada TPS Kotagede sebanyak 63,5% atau 10.398 suara. Sedangkan Pasangan Imam- Fadli menang di 7 TPS dengan kemengan terbesar di TPS Jetis sebanyak 61,8% atau 8026 suara. Kedua Calon Sama-sama menang di 7 dari 14 TPS di Yogyakarta. Pemilukada Walikota Yogyakarta tahun 2017 diikuti oleh 213.948 orang dari total pemilih 301.886 orang atau 70,9% memilih sedangkan 29,1% Golput.

Kedua calon yang Sama-sama petahana membuat mereka saling mengenal karakter dan pribadi satu sama lain, Pengalaman selama 5 tahun memimpin juga membuat keduanya memahami seluk beluk Kota Jogja, sehingga mereka tahu kebijakan dan program apa saja yang akan mereka tawarkan kepada

pemilih. Beberapa poin diatas membuat kedua calon harus memutar otak dengan keras guna memikirkan strategi apa saja yang akan mereka pakai guna mendapatkan simpati pemilih.

Selain pertarungan personal antara kedua Calon pertarungan Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih juga terjadi di Pilkada Yogyakarta. Pasangan nomor urut 1 (satu) Imam-Fadly diusung oleh PDIP, PKB dan Partai Nasdem, sedangkan pasangan Hariyadi-Heru diusung oleh Golkar, PAN, PKS, Demokrat dan Gerindra(<https://merahputih.com/post/read/imam-priyono-ahmad-fadli-didukung-3-partai>,21/08/2018). Seperti yang kita ketahui bersama Pilkada DKI juga diramaikan oleh kisruh KMP dan KIH. Kasus penistaan agama, demo Ormas Berjilid-jilid juga ditangkanya Buzzer-buzzer politik penebar kebencian, tentu tidak bisa dilepaskan dari pertarungan politik KMP dan KIH juga pemerintah dan oposisi. Pertanyaannya kemudian yang menarik untuk di kaji apakah ada pengaruh yang signifikan terhadap perolehan suara kandidat yang diusung oleh kedua koalisi partai tersebut di Daerah lain di Indonesia misalnya dalam konteks ini Yogyakarta?

Selama menjadi Walikota dan Wakil Walikota Hariyadi Suyuti dan Imam Priyono mempunyai catatan positif dan negatif dari kepemimpinannya. Penghargaan INAGARA (Inovasi Administrasi Negara) Award dari Mensesneg pada tahun 2015 menjadi salah satu contoh catatan positif dari kepemimpinan mereka. Namun selama menjabat menjadi Walikota dan Wakil Walikota Hariyadi

dan Imam juga mendapat banyak kritikan salah satunya mengenai maraknya pembangunan hotel yang bertolak belakang dengan filosofi Jogja sebagai kota pelajar. Catatan baik dan buruk ini kemudian menjadi nilai penting bagi pertarungan kedua Calon.

Saat masa kampanye kedua calon Sama-sama mengklaim Prestasi-prestasi yang berhasil dicapai selama memimpin Jogja, namun ketika dihadapkan dengan catatan negatif seperti pembangunan hotel misalnya, kedua calon saling menyalahkan satu sama lain misalnya dalam debat Pilkada yang digelar KPUD di TVRI pada 3 Februari 2017 pasangan nomor urut 1 Imam Priyono bertanya kepada Hariyadi Suyuti bahwa :“Saya akan bertanya bagaimana agar Isu-isu mengenai perizinan hotel ini tidak muncul. Apalagi ada broker dalam pengurusan izin?”(<http://jogja.tribunnews.com/2017/02/03/haryadi-suyuti-imam-priyono-kembali-beradu-argumen-di-debat-ketiga-pilkada-yogyakarta>,21/08/2018).

Pernyataan imam diatas secara tidak langsung ingin menggiring opini bahwa menjamurnya hotel dan pusat perbelanjaan modern di Kota Yogyakarta adalah kesalahan Hariyadi Suyuti selaku Walikota.

Ada beberapa fenomena menarik saat Pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2017 di gelar. Salah satunya , munculnya Gerakan Jogja Independen sebagai antitesa kepemimpinan rezim Haryadi-Imam pada periode 2011-2017. Gerakan jogja independen ini dibentuk untuk mengakomodasi kelompok-kelompok non-elit yang tidak memiliki ruang ekspresi politik agar dapat berpartisipasi di bidang politik, karena menurut hemat para deklaratör gerakan “*Joint*” Pilkada adalah

saluran penting yang harus dikawal dengan berpartisipasi aktif , sedangkan para Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2017 adalah wajah lama yang notabene telah gagal dalam menjawab persoalan-persoalan masyarakat yang fundamental. Senada dengan hal ini akademisi dan pengamat politik David Efendi mengemukakan Walikota terpilih abai terhadap berbagai persoalan perkotaan seperti kemacetan, hotelisasi, ekspansi pasar modern berjejar. Sehingga muara dari hal tersebut adalah terbentuknya arus gerakan dari bawah atau dalam masyarakat sendiri yang menamakan diri dengan Gerakan Jogja Independen atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gerakan Joint (<https://www.kompasiana.com/mas david/56ee2b6f8823bd0f0663eca1/gerakan-jogja-independent>, 23/11/2018).

Semangat Gerakan Joint kemudian mulai merebak ke seantero Kota Yogyakarta, termasuk dalam media sosial. Salah satunya dalam Polling yang dilakukan oleh Marzuki seorang seniman Jogja pelantun lagu “*Jogja Ora di Dol*” dalam akun teitter miliknya yang menyatakan bahwa ; dari 133 sampel Garin Nugroho menang mutlak dengan mengantongi 66 persen suara, Wakil Wali Kota Yogya Imam Priyono memperoleh suara 14 persen, tokoh ormas GPK Muhammad Fuad sebesar 11 persen, dan paling bontot atau paling kecil yakni WaliKota Haryadi Suyuti yang mengantongi polling hanya sebanyak 9 persen (<https://nasional.tempo.co/read/765310/garin-nugroho-menang-pilkada-yogya-versi-survei-twitter/full&view=ok>22/11/2019). Dari Polling tersebut dapat dilihat betapa pengguna media sosial dalam hal ini twitter kurang begitu suka dengan sosok Haryadi, fakta ini salah satunya mungkin di sebabkan oleh isu

menjamurnya pembangunan Hotel dan Pusat Perbelanjaan Modern di Kota Yogyakarta di bawah kepemimpinan Haryadi. Selain itu, pada tahun 2013 ketika semangat “*Jogja Ora Didol*” mulai menggeliat, ada pengajuan permohonan perizinan pembangunan hotel sebanyak 106. Dari jumlah tersebut, sebanyak 29 pengajuan izin telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Kota Yogyakarta dibawah kepemimpinan Haryadi Suyuti sebagai Walikota Kota Yogyakarta (<https://www.cendananews.com/2015/09/jogja-ora-didol-gerakan-melawan-kapitalisme-di-yogyakarta.html> 22/11/2018).

Kuatnya arus perlawanan yang dilakukan masyarakat Jogja terhadap Haryadi dengan hadirnya gerakan Jogja Ora Didol pada tahun 2013, dan Gerakan Jogja Independent dalam Pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2017 membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini, karena bagaimanapun dengan adanya dua Gerakan diatas, seolah tak memberikan dampak apapun bagi perolehan suara Haryadi Suyuti dalam Pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2017. Karena, Haryadi dan Wakilnya Heroe Poerwadi akhirnya berhasil memenangkan Pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2017. Menurut asumsi penulis Kemenangan Haryadi-Heroe bisa jadi disebabkan oleh beberapa hal seperti iklim politik Nasional yang kala itu memanas karena kasus penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dalam Pilkada DKI Jakarta yang mengakibatkan menguatnya arus politik identitas dalam Pilkada serentak Tahun 2017 sehingga berdampak terhadap beberapa Daerah lain di Indonesia termasuk Kota Yogyakarta. Karena menguatnya arus politik identitas tersebut memicu lahirnya kebencian masyarakat terhadap PDIP sebagai Partai Politik pengusung Ahok, sedangkan Di

Kota Yogyakarta sendiri Imam Priyono dan Ahmad Fadly juga di dukung oleh PDIP. Atau bisa juga disebabkan oleh baiknya strategi kampanye yang di formulasikan oleh Haryadi dan tim suksesnya sehingga dengannya Haryadi-Heroe bisa menarik simpati masyarakat Kota Yogyakarta lalu kemudian menjadi pemenang. Faktor yang lain mungkin kemenangan Haryadi-Heroe bisa juga disebabkan kurang maksimalnya Imam-Fadli dan Tim Suksesnya memanfaatkan celah dari lawan mereka. Karena beberapa paparan diataslah penulis kemudian memilih untuk melakukan penelitian dengan Judul” **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemenangan Haryadi Suyuti Dan Heroe Poerwadi Dalam Pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2017**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemenangan Haryadi Suyuti dan Heroe Poerwadi dalam Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2017?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemenangan hariyadi suyuti dan heroe poerwadi dalam pilkada walikota yogyakarta tahun 2017?

## **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

### **1.3.2.1 Manfaaf Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan teori strategi kampanye dan strategi marketing dalam memenangkan pemilu.

### **1.3.2.2 Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi kepada partai politik, dan kandidat agar kedepan dapat dilakukan berbagai evaluasi terkait dengan strategi memenangkan pemilu. Sedangkan untuk para akademisi penelitian ini dapat dijadikan sebuah referensi dalam kajian tentang strategi pemenangan dan marketing politik agar bisa dijadikan sebagai dasar untuk penelitian-penelitian lain dengan kajian yang sejenis.